

PENGUMUMAN
NOMOR P.26/Ka/BPIP/04/2018
TENTANG
SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2018

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bukan Pegawai Negeri Sipil (dapat untuk jabatan Deputy) yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi:

NO	JABATAN	Jenjang Jabatan
1	Sekretaris Utama	JPT Madya (Ia)
2	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	JPT Madya (Ia)
3	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	JPT Madya (Ia)
4	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	JPT Madya (Ia)
5	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	JPT Madya (Ia)
6	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	JPT Madya (Ia)

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:

1. Untuk JPT Sekretaris Utama berstatus sebagai PNS atau bagi yang berstatus TNI/POLRI jika diterima wajib mengundurkan diri dari TNI/POLRI atau alih status ke PNS.
2. Untuk JPT Deputy, dapat berasal dari yang bukan berstatus PNS atau berstatus PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau untuk TNI/POLRI jika diterima wajib mengundurkan diri dari TNI/POLRI atau alih status ke PNS.
3. Bagi yang berstatus PNS/TNI/POLRI, mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Panglima TNI/Kapolri yang dinyatakan dengan Surat Persetujuan.
4. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 September 2018.
5. Kualifikasi pendidikan paling rendah S2 atau Magister.
6. Bagi yang berstatus PNS/TNI/POLRI, sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional Ahli Utama/sekurang-kurangnya Lektor Kepala paling singkat 2 (dua) tahun, dan memiliki pangkat minimal Pembina Utama Muda (IV/c).

7. Memiliki rekam jejak jabatan/pekerjaan, integritas, dan moralitas yang baik.
8. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
9. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
10. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
11. Tidak pernah menjadi terpidana dalam suatu tindak pidana kejahatan.
12. Telah menyerahkan SPT/Pph Pribadi terakhir.
13. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir.
14. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
15. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
16. Menyerahkan pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6, sebanyak 2 (dua) lembar.

B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi:

NO	JABATAN	Jenjang Jabatan
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	JPT Pratama (IIa)
2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	JPT Pratama (IIa)
3.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	JPT Pratama (IIa)
4.	Kepala Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	JPT Pratama (IIa)
5.	Kepala Biro Pengawasan Internal	JPT Pratama (IIa)
6.	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;	JPT Pratama (IIa)
7.	Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;	JPT Pratama (IIa)
8.	Direktur Pembudayaan	JPT Pratama (IIa)
9.	Direktur Analisis dan Sinkronisasi	JPT Pratama (IIa)
10.	Direktur Advokasi	JPT Pratama (IIa)
11.	Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi	JPT Pratama (IIa)
12.	Direktur Pengkajian Materi	JPT Pratama (IIa)
13.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	JPT Pratama (IIa)
14.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal	JPT Pratama (IIa)
15.	Direktur Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan	JPT Pratama (IIa)
16.	Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	JPT Pratama (IIa)

17.	Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	JPT Pratama (IIa)
18.	Direktur Pengendalian	JPT Pratama (IIa)
19.	Direktur Evaluasi	JPT Pratama (IIa)
20.	Kepala Pusat Data dan Informasi	JPT Pratama (IIa)

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

1. Berstatus sebagai PNS atau bagi yang berstatus TNI/POLRI jika diterima wajib mengundurkan diri dari TNI/POLRI atau alih status ke PNS.
2. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Panglima TNI/Kapolri yang dinyatakan dengan Surat Persetujuan.
3. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 September 2018.
4. Kualifikasi pendidikan paling rendah S1.
5. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (struktural eselon III.a) atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (struktural eselon II.b atau II.a)/Jabatan Fungsional Ahli Madya/sekurang-kurangnya Lektor Kepala atau setara paling singkat 2 (dua) tahun, dan memiliki pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b).
6. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
8. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
9. Tidak menjadi anggota Partai Politik.
10. Tidak pernah menjadi terpidana dalam suatu tindak pidana kejahatan.
11. Telah menyerahkan SPT/Pph Pribadi terakhir.
12. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi yang tidak wajib lapor LHKPN.
13. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
15. Menyerahkan pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6, sebanyak 2 (dua) lembar.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Peserta melakukan registrasi *online* melalui laman <http://www.kemenkumham.go.id> dan <http://www.bpip.go.id> mulai tanggal 27 April 2018 dan ditutup tanggal 18 Mei 2018 pukul 16.00 WIB, kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran;
- B. Berkas lamaran terdiri dari:
 1. Surat Lamaran ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-, (sesuai format).
 2. Daftar Riwayat Hidup (sesuai format).

3. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian/Panglima TNI/Kapolri, untuk pelamar dari PNS/TNI/Polri (contoh format).
 4. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang bermaterai Rp.6.000,- (sesuai format).
 5. Surat Pernyataan netralitas yang bermaterai Rp.6.000,- (sesuai format).
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
 7. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
 8. Fotokopi SPT Tahun 2017.
 9. Fotokopi tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN.
 10. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi terakhir.
 11. Fotokopi SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir, hanya untuk pelamar dari PNS/TNI/Polri.
 12. Fotokopi SK Jabatan Struktural/Fungsional terakhir, hanya untuk pelamar dari PNS/TNI/Polri.
 13. Fotokopi penilaian prestasi kerja tahun 2016 dan 2017.
 14. Surat keterangan sehat dari dokter pada rumah sakit pemerintah.
- C. Berkas lamaran dan tanda bukti pendaftaran dibawa pada saat pelaksanaan Penulisan Makalah.
- D. Contoh surat lamaran, formulir persetujuan dan surat pernyataan dapat diunduh melalui laman <http://www.kemenkumham.go.id> dan <http://www.bpip.go.id>.

III. JADWAL KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi Terbuka	27 April 2018
2.	Pendaftaran Peserta Seleksi Terbuka	27 April – 18 Mei 2018
3.	Seleksi Administrasi	27 April – 21 Mei 2018
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 Mei 2018
5.	Penulisan Makalah	4 Juni 2018
6.	<i>Assessment Center</i>	26 – 28 Juni 2018
6.	Wawancara dengan Panitia Seleksi	2 – 4 Juli 2018

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman hasil seleksi administrasi dapat dilihat melalui laman <http://www.kemenkumham.go.id> dan <http://www.bpip.go.id>.
2. Peserta harus aktif mengakses laman dimaksud.
3. Biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta tidak ditanggung oleh Panitia Seleksi.
4. Jika diketahui bahwa peserta seleksi memberikan informasi/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan.

5. Panitia Seleksi tidak memungut biaya dari peserta seleksi karena pelaksanaan seleksi sudah ditanggung APBN.
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Jakarta, 27 April 2018

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd

YUDI LATIF